

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Pengertian Judul

Judul yang dipilih perancangan ini Adalah “*Integrated Inclusive Kindergarten and Elementary School in Boyolali: Architectural Design Based On A Healing Environment Approach to Support Holistic Learning*”. Adapun pengertian dari masing-masing istilah pada judul tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Pengertian Judul

| Judul                                                      | Definsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Integrated Inclusive Kindergarten–Elementary School</i> | Sekolah inklusif terpadu jenjang taman kanak-kanak dan sekolah dasar merupakan satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan layanan pendidikan secara terintegrasi bagi anak usia dini dan pendidikan dasar dalam satu kawasan pembelajaran, dengan memberikan kesempatan kepada seluruh peserta didik termasuk anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dalam lingkungan pendidikan yang sama. Konsep pendidikan inklusif ini mengacu pada Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. |
| <i>Healing Environment</i>                                 | <i>Healing environment</i> merupakan pendekatan desain yang menekankan kualitas lingkungan binaan dalam mendukung kesejahteraan fisik, psikologis, dan emosional pengguna melalui pengolahan elemen ruang seperti pencahayaan alami, kualitas udara, vegetasi, kenyamanan termal, dan pengendalian kebisingan. Pendekatan ini bertujuan menciptakan lingkungan yang mampu mengurangi stres, meningkatkan kenyamanan psikologis, serta mendukung kesehatan mental pengguna dalam suatu ruang binaan (Papatungan , Otoluwa, Malahika , & Ahmad, 2025)                                                                 |
| <i>Holistic Learning</i>                                   | <i>Holistic learning</i> merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan pengembangan peserta didik secara menyeluruh, mencakup aspek intelektual, emosional, sosial, fisik, dan spiritual dalam proses Pendidikan. Pendidikan ini memandang bahwa pembelajaran tidak hanya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter, kreativitas, serta keseimbangan individu secara utuh.                                                                                                                                                                        |
| Boyolali | Boyolali merupakan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang secara administratif dikenal sebagai Kabupaten Boyolali. Berdasarkan dokumen Perda Kabupaten Boyolali No. 7 Tahun 2021, sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia. |

Sumber : Permendiknas No. 70 (2009), Papatungan dkk. (2025), Perda Boyolali No. 7 (2021), diolah penulis (2026).

Berdasarkan pengertian dari masing-masing istilah tersebut, maka *Integrated Inclusive Kindergarten and Elementary School in Boyolali: Architectural Design Based On A Healing Environment Approach to Support Holistic Learning* dapat diartikan sebagai perancangan fasilitas pendidikan terpadu jenjang TK–SD yang mengintegrasikan sistem pendidikan inklusif dalam satu lingkungan pembelajaran, dengan pendekatan *healing environment* sebagai strategi desain untuk mewujudkan proses belajar yang holistik.

Pendekatan *healing environment* diwujudkan melalui pengolahan elemen arsitektural yang mendukung kenyamanan fisik, psikologis, dan emosional pengguna, meliputi optimalisasi pencahayaan alami, ventilasi silang, integrasi elemen alam, pengendalian kebisingan, serta tata ruang yang adaptif dan menenangkan. Pendekatan ini menjadi relevan mengingat keberagaman karakteristik pengguna pada sekolah inklusif, khususnya peserta didik berkebutuhan khusus yang membutuhkan lingkungan minim overstimulasi sensorik dan mendukung rasa aman dalam beraktivitas.

Dalam kaitannya dengan *holistic learning*, *healing environment* berperan sebagai media spasial yang mendorong perkembangan peserta didik secara menyeluruh — tidak hanya akademik, tetapi juga emosional, sosial, dan fisik. Lingkungan belajar yang restoratif dan kondusif terbukti mampu meningkatkan konsentrasi, mengurangi stres, dan mendorong interaksi sosial yang positif, sehingga proses pembelajaran tidak sekadar berorientasi pada

transfer pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kesejahteraan anak secara optimal.

Dengan demikian, judul ini merepresentasikan upaya merancang fasilitas pendidikan inklusif terpadu di Kabupaten Boyolali yang tidak hanya memenuhi kebutuhan fungsional, tetapi juga menghadirkan lingkungan belajar yang sehat, adaptif, dan suportif guna menunjang perkembangan peserta didik secara kognitif, emosional, sosial, dan fisik sesuai tahap perkembangannya.

## 1.2 Latar Belakang

### 1.2.1 Pendidikan Inklusif dalam Konteks Global



Gambar 1 Sustainable Development Goals

Sumber: <https://www.vecteezy.com/free-vector/sustainable-development-goals>

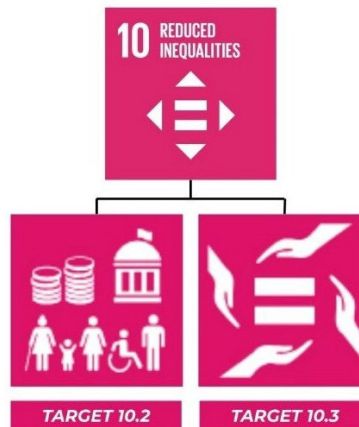
Pendidikan inklusif merupakan bagian dari agenda pembangunan global yang menekankan prinsip kesetaraan akses terhadap pendidikan bagi seluruh individu tanpa diskriminasi. Konsep ini menjadi salah satu fokus utama dalam agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dicanangkan oleh United Nations pada tahun 2015. Dalam konteks ini, pendidikan inklusif tidak hanya berkaitan dengan penyediaan akses belajar, tetapi juga mencakup upaya pengurangan kesenjangan sosial serta penciptaan sistem pendidikan yang adil dan setara bagi seluruh lapisan masyarakat.



Gambar 2 Sustainable Development Goals Poin 4, 4.1, 4.5, 4.a

Sumber: <https://globalgoals.org/goals/4-quality-education/>

Secara khusus, komitmen terhadap pendidikan inklusif tercantum dalam Tujuan 4 (*Quality Education*) yang bertujuan untuk menjamin pendidikan yang inklusif, setara, dan berkualitas serta mendorong kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua. Implementasi tujuan tersebut dijabarkan melalui beberapa target, antara lain SDGs Target 4.1 (*Free Primary And Secondary Education*) yang menekankan bahwa seluruh anak laki-laki dan perempuan harus menyelesaikan pendidikan dasar yang gratis, setara, dan berkualitas. Selain itu, SDGs Target 4.5 (*Eliminate All Discrimination In Education*) menekankan pentingnya penghapusan kesenjangan dalam akses pendidikan bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas. Lebih lanjut, SDGs Target 4.a (*Increase The Supply Of Qualified Teachers In Developing Countries*) menegaskan perlunya pembangunan fasilitas pendidikan yang aman, inklusif, dan ramah anak melalui penyediaan lingkungan belajar yang responsif terhadap kebutuhan fisik maupun psikologis peserta didik (United Nations, 2015). Dengan demikian, pendidikan inklusif tidak hanya berorientasi pada aspek kurikulum, tetapi juga pada kualitas lingkungan fisik sebagai wadah berlangsungnya proses pembelajaran.



Gambar 3 Sustainable Development Goals Poin 10, 10.2, 10.3  
 Sumber: <https://globalgoals.org/goals/10-reduced-inequalities/>

Prinsip pendidikan inklusif juga berkaitan erat dengan Tujuan 10 (*Reduced Inequalities*), khususnya pada target 10.2 dan 10.3. Target 10.2 (*Promote Universal Social Economic And Political Inclusion*) menekankan pentingnya pemberdayaan dan inklusi sosial bagi seluruh individu tanpa memandang kondisi fisik, sosial, maupun ekonomi, sedangkan target 10.3 (*Ensure Equal Opportunities and end Discrimination*) menegaskan perlunya menjamin kesetaraan kesempatan serta menghapus segala bentuk diskriminasi. Dalam konteks pendidikan, kedua target tersebut memperkuat urgensi penyediaan lingkungan belajar yang mampu mengakomodasi keberagaman peserta didik secara adil dan setara. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan inklusif tidak hanya menjadi isu sektoral dalam bidang pendidikan, tetapi juga bagian dari upaya global dalam mengurangi kesenjangan sosial.

Secara global, UNESCO melaporkan bahwa lebih dari 90 juta anak penyandang disabilitas di dunia masih belum memperoleh akses pendidikan formal yang memadai dan memiliki risiko lebih tinggi untuk tidak bersekolah dibandingkan anak tanpa disabilitas (UNESCO, 2020). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun komitmen terhadap pendidikan inklusif telah ditekankan dalam SDGs 4 dan SDGs 10, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Permasalahan tersebut

tidak hanya terletak pada aspek kebijakan, tetapi juga pada kesiapan sistem pendidikan secara menyeluruh, termasuk dalam penyediaan infrastruktur fisik dan lingkungan belajar yang aksesibel. Banyak fasilitas pendidikan di berbagai negara masih belum dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan mobilitas, kenyamanan sensorik, serta aspek psikologis peserta didik berkebutuhan khusus, sehingga belum sepenuhnya mampu mendukung prinsip kesetaraan dan inklusif.

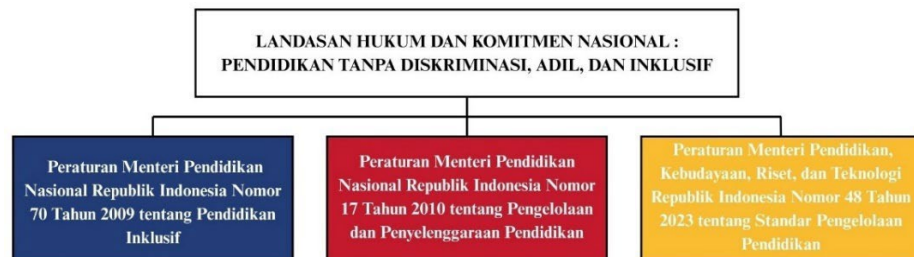
Lebih lanjut, laporan United Nations (2015) menegaskan bahwa penerapan pendidikan inklusif tidak cukup hanya dengan mengintegrasikan siswa berkebutuhan khusus ke dalam sistem pendidikan reguler. Sejalan dengan target SDGs 4.a serta prinsip inklusi pada SDGs 10.2 dan 10.3, lingkungan belajar perlu dirancang secara komprehensif agar mampu mendukung partisipasi aktif seluruh peserta didik. Hal ini dapat diwujudkan melalui penyediaan fasilitas yang aman, nyaman, mudah diakses, serta responsif terhadap kebutuhan fisik dan psikologis pengguna. Dengan demikian, pendidikan inklusif tidak hanya berkaitan dengan aspek kebijakan dan kurikulum, tetapi juga erat kaitannya dengan perancangan lingkungan fisik dan desain ruang yang mampu mendukung proses pembelajaran serta perkembangan anak secara holistik.

### **1.2.2 Pendidikan Inklusif di Indonesia**

Indonesia telah menunjukkan komitmen terhadap pendidikan inklusif melalui sejumlah regulasi nasional yang menjadi landasan hukum penyelenggaraannya. Tiga regulasi utama yang mengatur hal ini antara lain:

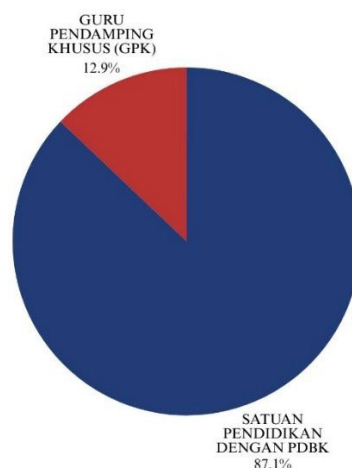
1. Permendiknas No. 70 Tahun 2009 yang mewajibkan pemerintah daerah membuka akses pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah reguler
2. Permendiknas No. 17 Tahun 2010 yang mengatur dua jalur layanan pendidikan khusus, yaitu Sekolah Luar Biasa (SLB) dan pendidikan inklusif pada sekolah reguler

3. Permendikbudristek No. 48 Tahun 2023 yang menegaskan kewajiban satuan pendidikan untuk menyelenggarakan pembelajaran yang menghargai keberagaman peserta didik di semua jenjang.



Gambar 4 Landasan Hukum dan Komitmen Nasional  
Sumber: Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Regulasi ini menegaskan bahwa satuan pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah perlu menyelenggarakan layanan pembelajaran yang menghargai keberagaman peserta didik, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus. Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat sistem pendidikan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan peserta didik.



Gambar 5 Keterbatasan Fasilitas Sekolah Inklusif Di Indonesia  
Sumber (ANTARA News, 2023), (di Analisis Penulis , 2026)

Meskipun berbagai kebijakan telah disusun untuk mendukung implementasi pendidikan inklusif, pelaksanaannya di lapangan masih

menghadapi sejumlah tantangan. Data nasional tahun 2023 menunjukkan bahwa terdapat sekitar 40.164 satuan pendidikan yang memiliki peserta didik berkebutuhan khusus, namun hanya sekitar 14,83% sekolah yang memiliki Guru Pendamping Khusus (GPK) yang memiliki kompetensi dalam mendampingi proses pembelajaran inklusif (ANTARA News, 2023). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara jumlah peserta didik berkebutuhan khusus dengan ketersediaan tenaga pendidik yang memiliki keahlian khusus dalam mendukung proses pembelajaran mereka.

Permasalahan serupa juga disoroti oleh laporan media nasional yang menyatakan bahwa keterbatasan jumlah guru pendamping khusus serta kesiapan institusi pendidikan masih menjadi tantangan utama dalam implementasi pendidikan inklusif di berbagai daerah di Indonesia (Kompas, 2023). Selain keterbatasan sumber daya manusia, pemahaman mengenai konsep pendidikan inklusif di tingkat satuan pendidikan juga masih beragam, sehingga kualitas penyelenggaraan pendidikan inklusif belum merata di seluruh wilayah.

Selain faktor kebijakan dan sumber daya manusia, berbagai penelitian akademik menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif juga dipengaruhi oleh kesiapan sistem pendidikan secara menyeluruh. Penelitian yang dipublikasikan dalam (Ru'iya, Akhmad, Putwiyan, & Sulistiawan, 2021; Ru'iya, Akhmad, Putwiyan, & Sulistiawan, 2021) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi pendidikan inklusif sangat bergantung pada dukungan institusi pendidikan, kesiapan tenaga pendidik, serta pemahaman yang baik terhadap prinsip-prinsip pendidikan inklusif. Sementara itu, penelitian dalam (Sulistyowati, Wardoyo, & Karwanto, 2026) menegaskan bahwa kualitas lingkungan belajar yang memberikan rasa aman dan nyaman juga berperan penting dalam mendukung proses pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus.

Berdasarkan berbagai kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia masih memerlukan penguatan pada berbagai aspek, mulai dari kebijakan, kesiapan institusi

pendidikan, hingga dukungan sistem pembelajaran yang memadai. Upaya mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif tidak hanya bergantung pada regulasi yang ditetapkan pemerintah, tetapi juga memerlukan pengembangan lingkungan pendidikan yang mampu mengakomodasi keberagaman kebutuhan peserta didik secara menyeluruh.

### 1.2.3 Keterbatasan Fasilitas Sekolah Inklusif di Indonesia



Gambar 6 Keterbatasan Fasilitas Sekolah Inklusif Di Indonesia  
Sumber (Analisis Penulis , 2026)

Meskipun konsep pendidikan inklusif telah berkembang dalam sistem pendidikan nasional, kesiapan fasilitas fisik pada banyak satuan pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai keterbatasan. Sebagian besar sekolah penyelenggara pendidikan inklusif merupakan sekolah reguler yang melakukan penyesuaian terhadap bangunan yang telah ada. Kondisi tersebut menyebabkan lingkungan fisik sekolah belum sepenuhnya dirancang untuk mengakomodasi keberagaman kebutuhan peserta didik, khususnya bagi anak berkebutuhan khusus yang memerlukan dukungan lingkungan belajar yang lebih aksesibel dan responsif terhadap kondisi fisik maupun sensorik.

Berbagai penelitian akademik menunjukkan bahwa keterbatasan fasilitas fisik menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan pendidikan inklusif. Penelitian yang dipublikasikan dalam *Jurnal At-Tarbawi* menyatakan bahwa banyak

sekolah inklusif belum memiliki fasilitas pendukung yang memadai, seperti jalur sirkulasi yang aksesibel, toilet ramah difabel, serta ruang terapi yang dapat menunjang kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Keterbatasan fasilitas tersebut berdampak pada keterbatasan mobilitas siswa serta kurang optimalnya proses pembelajaran yang berlangsung di lingkungan sekolah.

Selain aspek aksesibilitas fisik, kualitas lingkungan belajar juga memiliki pengaruh terhadap kenyamanan dan konsentrasi belajar peserta didik. Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal *Research Horizon* menunjukkan bahwa faktor lingkungan seperti kualitas pencahayaan alami, ventilasi udara, serta pengendalian kebisingan memiliki hubungan dengan kondisi psikologis dan tingkat fokus belajar siswa. Lingkungan belajar yang tidak dirancang dengan mempertimbangkan faktor kenyamanan sensorik dapat menimbulkan tekanan lingkungan yang berdampak pada menurunnya kualitas interaksi belajar, terutama bagi anak yang memiliki sensitivitas terhadap rangsangan lingkungan.

Permasalahan lain yang sering ditemukan adalah belum terintegrasinya fasilitas pendidikan antar jenjang pendidikan. Pada beberapa wilayah, layanan pendidikan inklusif pada jenjang taman kanak-kanak dan sekolah dasar masih diselenggarakan pada lokasi yang berbeda. Kondisi ini menyebabkan peserta didik harus beradaptasi kembali dengan lingkungan fisik yang baru ketika berpindah jenjang pendidikan, padahal periode perkembangan anak pada usia dini hingga sekolah dasar merupakan fase penting dalam pembentukan kemampuan kognitif, sosial, dan emosional.

Berdasarkan sintesis dari berbagai penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa keberhasilan pendidikan inklusif tidak hanya ditentukan oleh kebijakan dan sistem pembelajaran, tetapi juga oleh kualitas lingkungan fisik sekolah yang mampu mendukung aksesibilitas, kenyamanan sensorik, serta interaksi belajar yang optimal. Oleh karena itu, perancangan fasilitas pendidikan inklusif perlu mempertimbangkan aspek desain ruang, kualitas lingkungan belajar, serta integrasi antar jenjang

pendidikan agar tercipta lingkungan pendidikan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus.

#### 1.2.4 Tantangan Pembangunan Sekolah Inklusif di Boyolali



Gambar 7 Tantangan Pembangunan Sekolah Inklusif di Boyolali  
Sumber (Analisis Penulis, 2026)

Kabupaten Boyolali merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah yang telah mulai mengimplementasikan kebijakan pendidikan inklusif melalui penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus pada beberapa sekolah reguler. Implementasi tersebut menunjukkan adanya upaya daerah dalam mendukung kebijakan pendidikan nasional yang memberikan kesempatan belajar yang setara bagi seluruh peserta didik. Namun demikian, dalam praktiknya penyelenggaraan pendidikan inklusif di wilayah ini masih menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan kesiapan fasilitas pendidikan, dukungan layanan pembelajaran, serta perencanaan lingkungan belajar yang belum sepenuhnya dirancang secara khusus untuk mendukung sistem pendidikan inklusif.

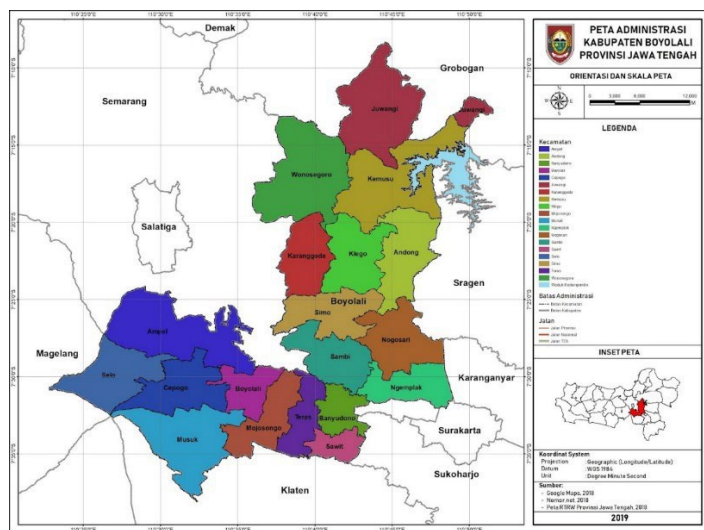
Salah satu tantangan utama berkaitan dengan aspek infrastruktur pendidikan. Sebagian besar layanan pendidikan inklusif di Boyolali masih diselenggarakan pada sekolah reguler yang pada awalnya dirancang untuk sistem pembelajaran konvensional. Penyesuaian terhadap bangunan yang telah ada umumnya dilakukan secara bertahap dan terbatas, sehingga berbagai elemen penting dalam desain sekolah inklusif seperti aksesibilitas sirkulasi, ruang layanan khusus, serta pengaturan kualitas lingkungan belajar belum sepenuhnya terpenuhi. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi pendidikan inklusif tidak hanya membutuhkan kebijakan administratif, tetapi juga memerlukan dukungan perencanaan fasilitas pendidikan yang dirancang secara komprehensif sejak tahap perancangan.

Selain aspek infrastruktur fisik, tantangan lain yang dihadapi berkaitan dengan ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Secara umum, penyelenggaraan pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus memerlukan dukungan tenaga pendidik yang memiliki pemahaman mengenai strategi pembelajaran adaptif serta kemampuan pendampingan yang sesuai dengan karakteristik kebutuhan peserta didik. Keterbatasan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi khusus tersebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas implementasi pendidikan inklusif di berbagai daerah.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan kesinambungan layanan pendidikan antar jenjang pendidikan. Pada banyak kasus, fasilitas pendidikan inklusif pada jenjang pendidikan anak usia dini dan sekolah dasar masih berada pada institusi yang berbeda, sehingga peserta didik harus beradaptasi kembali dengan lingkungan belajar yang baru ketika melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Bagi anak berkebutuhan khusus, perubahan lingkungan tersebut dapat mempengaruhi kenyamanan psikologis serta stabilitas proses pembelajaran pada masa transisi pendidikan.

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali 2021–2026 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2021, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Kebijakan tersebut menunjukkan adanya peluang strategis untuk mengembangkan fasilitas pendidikan yang mampu mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan secara lebih menyeluruh. Dalam konteks pendidikan inklusif, pengembangan fasilitas pendidikan yang dirancang secara terencana dan terintegrasi menjadi salah satu langkah penting untuk mendukung terciptanya lingkungan belajar yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh peserta didik di Kabupaten Boyolali.

#### 1.2.5 Kabupaten Boyolali sebagai Lokasi pengembangan



Gambar 8 Peta Administrasi Kabupaten Boyolali  
Sumber (Pemda Boyolali, 2021)

Kabupaten Boyolali merupakan salah satu daerah di Jawa Tengah yang memiliki rekam jejak cukup kuat dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Sejak pertengahan tahun 2000-an, jumlah sekolah penyelenggara inklusi berkembang signifikan dari sekitar 36 sekolah dasar menjadi lebih dari 80 sekolah yang mencakup berbagai jenjang pendidikan (Rahayu, 2018), mencerminkan komitmen nyata pemerintah daerah dalam

memperluas akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Sejalan dengan perkembangan tersebut, tercatat sekitar 1.173 anak berkebutuhan khusus teridentifikasi dalam sistem pendidikan dasar di wilayah ini, dengan keragaman kebutuhan mulai dari kesulitan belajar, gangguan perilaku, hingga gangguan komunikasi (Rahayu, 2018). Kondisi ini menegaskan bahwa keberadaan anak berkebutuhan khusus merupakan bagian tak terpisahkan dari realitas sistem pendidikan daerah yang menuntut layanan pendidikan yang lebih inklusif dan adaptif.

Dari sisi demografis, jumlah penduduk Boyolali yang mencapai lebih dari satu juta jiwa dengan proporsi kelompok usia 5–14 tahun yang cukup besar mengindikasikan bahwa kebutuhan terhadap fasilitas pendidikan dasar, termasuk layanan pendidikan inklusif, akan terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah anak usia sekolah (BPS Boyolali, 2023). Layanan pendidikan inklusif di wilayah ini telah berkembang dan tersebar di berbagai kecamatan dengan kepadatan penduduk relatif tinggi, seperti Kecamatan Boyolali, Mojosongo, Cepogo, dan Ampel (Dinas Pendidikan Kabupaten Boyolali, 2022). Meski demikian, hampir seluruh sekolah penyelenggara tersebut pada dasarnya merupakan sekolah reguler yang dimodifikasi secara terbatas, sehingga berbagai fasilitas pendukung seperti ruang terapi, ruang stimulasi sensorik, jalur sirkulasi aksesibel, serta pengendalian kualitas lingkungan belajar belum tersedia secara optimal.

Persoalan lain yang tak kalah mendasar adalah belum adanya kesinambungan layanan pendidikan inklusif antar jenjang. Layanan pada jenjang TK dan SD umumnya masih diselenggarakan secara terpisah pada institusi yang berbeda, sehingga peserta didik harus berpindah lingkungan belajar ketika melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Bagi anak berkebutuhan khusus, perpindahan ini dapat mengganggu stabilitas proses adaptasi dari aspek sosial, emosional, maupun pembelajaran. Padahal, masa perkembangan pada rentang usia dini hingga sekolah dasar merupakan fase krusial dalam pembentukan kemampuan kognitif, sosial, dan emosional yang memerlukan lingkungan belajar yang stabil dan berkelanjutan.

Boyolali juga memiliki keunggulan posisi geografis yang strategis dalam kawasan Solo Raya, dengan konektivitas yang baik ke Surakarta, Salatiga, dan Klaten, sehingga berpotensi berkembang sebagai pusat layanan pendidikan inklusif di tingkat regional (RPJMD Kabupaten Boyolali 2021–2026). Namun potensi ini belum diimbangi ketersediaan fasilitas yang memadai — hingga saat ini belum tersedia sekolah inklusif terpadu jenjang TK–SD yang dirancang secara komprehensif dalam satu kawasan pendidikan. Oleh karena itu, pengembangan fasilitas sekolah inklusif terpadu yang direncanakan sejak tahap awal dengan mempertimbangkan aksesibilitas, kenyamanan sensorik, kebutuhan perkembangan psikologis, serta kesinambungan layanan antar jenjang menjadi langkah strategis dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang lebih adaptif dan berkelanjutan bagi seluruh peserta didik di Kabupaten Boyolali.

#### **1.2.6 *Healing Environment* untuk mewujudkan Lingkungan Pembelajaran Holistik**

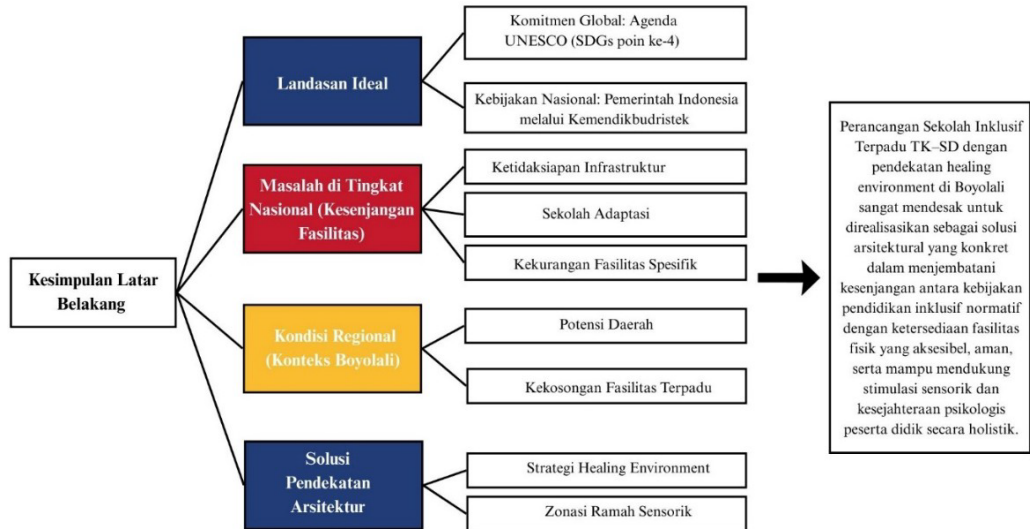
Pendekatan *healing environment* dalam arsitektur menekankan penciptaan ruang yang mampu mendukung kenyamanan emosional, stabilitas psikologis, serta kesejahteraan penggunanya. Konsep ini awalnya banyak diterapkan pada fasilitas kesehatan, namun dalam perkembangan terkini menjadi sangat relevan pada fasilitas pendidikan, khususnya sekolah inklusif. Anak berkebutuhan khusus sering memiliki sensitivitas tinggi terhadap cahaya berlebih, kebisingan, kepadatan visual, tekstur tertentu, maupun tata ruang yang membingungkan. Oleh karena itu, lingkungan fisik sekolah tidak hanya berfungsi sebagai wadah aktivitas belajar, tetapi juga sebagai media terapi pasif yang dapat membantu regulasi emosi dan perilaku.

Lingkungan fisik sekolah berperan sebagai media terapi pasif yang krusial dalam membantu regulasi emosi dan perilaku siswa, sebagaimana ditegaskan dalam (Meiliani, 2025) bahwa kualitas lingkungan fisik berpengaruh signifikan terhadap kenyamanan belajar serta kondisi

psikologis peserta didik. Studi tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip *biophilic design*, pencahayaan alami optimal, ventilasi silang, pengendalian akustik, serta zonasi ruang ramah sensorik mampu secara efektif menurunkan tingkat stres, meningkatkan fokus, dan memperbaiki interaksi sosial. Sejalan dengan hal tersebut, (Damayanti, Putro, & Alhamdani, 2024) memperkuat strategi ini dengan menyoroti penggunaan elemen alami seperti vegetasi untuk meredam suara serta orientasi bangunan yang tepat guna menciptakan efek *healing* bagi psikologis siswa berkebutuhan khusus. Dalam konteks pendidikan inklusif, integrasi pendekatan arsitektural ini tidak hanya memenuhi aspek fungsional, tetapi juga menjadi strategi desain yang mendukung perkembangan kognitif, emosional, sosial, dan motorik anak secara lebih seimbang.

Secara arsitektural, healing environment mendorong terciptanya sekolah sebagai ekosistem pembelajaran yang adaptif dan suportif. Integrasi ruang terbuka hijau, penggunaan material alami, pengaturan skala ruang yang proporsional bagi anak, serta transisi ruang yang jelas akan membantu anak merasa aman dan tidak terstimulasi secara berlebihan. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya menjawab kebutuhan teknis aksesibilitas, tetapi juga memperkuat kualitas pengalaman ruang sebagai bagian dari proses pendidikan yang holistik dan inklusif.

### 1.2.7 Kesimpulan Latar Belakang



Gambar 9 Kesimpulan Latar Belakang  
Sumber (Analisis Penulis, 2026)

Pendidikan inklusif merupakan komitmen global yang menegaskan hak setiap peserta didik atas akses pendidikan yang setara, adil, dan berkualitas tanpa diskriminasi. Komitmen ini secara eksplisit tercantum dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dicanangkan oleh United Nations, khususnya Tujuan 4 yang mendorong sistem pendidikan inklusif dan berkelanjutan, serta Tujuan 10 yang menekankan penghapusan kesenjangan dan diskriminasi sosial. Namun, UNESCO (2020) mencatat bahwa lebih dari 90 juta anak penyandang disabilitas di dunia masih belum memperoleh akses pendidikan formal yang memadai. Kondisi ini membuktikan bahwa implementasi pendidikan inklusif tidak cukup bertumpu pada kebijakan normatif semata, melainkan juga memerlukan dukungan lingkungan fisik yang dirancang secara aksesibel, aman, dan responsif terhadap keberagaman kebutuhan peserta didik.

Di Indonesia, penguatan pendidikan inklusif telah didukung oleh sejumlah regulasi nasional, mulai dari Permendiknas No. 70 Tahun 2009, Permendiknas No. 17 Tahun 2010, hingga Permendikbudristek No. 48

Tahun 2023. Meski demikian, kesenjangan antara kebijakan dan implementasi di lapangan masih sangat nyata. Data tahun 2023 menunjukkan bahwa dari sekitar 40.164 sekolah yang menampung peserta didik berkebutuhan khusus, hanya 14,83% yang memiliki Guru Pendamping Khusus (GPK) berkompeten. Lebih dari itu, sebagian besar sekolah inklusif masih merupakan adaptasi terbatas dari bangunan konvensional yang tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan aksesibilitas, ruang terapi, maupun pengendalian lingkungan sensorik. Kondisi ini mencerminkan kesenjangan yang signifikan antara komitmen kebijakan pendidikan inklusif dengan kesiapan spasial dan infrastruktur pendidikan di lapangan.

Pada skala regional, Boyolali sebagai bagian dari kawasan Solo Raya memiliki potensi strategis dalam pengembangan pendidikan inklusif. Wilayah ini mencatat lebih dari 80 sekolah penyelenggara inklusi dengan sekitar 1.173 anak berkebutuhan khusus yang teridentifikasi dalam sistem pendidikan dasarnya. Sektor pendidikan juga telah ditetapkan sebagai prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Boyolali 2021–2026. Namun demikian, hingga saat ini belum tersedia fasilitas sekolah inklusif terpadu jenjang TK–SD yang dirancang secara komprehensif sejak tahap perencanaan dengan mempertimbangkan kebutuhan perkembangan fisik, psikologis, serta karakteristik pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Layanan antar jenjang pun masih terpisah secara institusional, sehingga berpotensi mengganggu stabilitas perkembangan anak pada fase pertumbuhan yang paling krusial.

Dalam konteks perancangan arsitektur pendidikan, pendekatan *healing environment* hadir sebagai strategi yang relevan dan terukur untuk menjawab tantangan tersebut. Berbagai penelitian membuktikan bahwa pencahayaan alami yang optimal, ventilasi silang, pengendalian akustik, integrasi elemen alam (*biophilic design*), serta zonasi ruang yang ramah sensorik mampu menurunkan tingkat stres, meningkatkan konsentrasi, dan memperkuat interaksi sosial peserta didik — terutama mereka yang

berkebutuhan khusus. Berdasarkan keseluruhan kondisi tersebut, perancangan Sekolah Inklusif Terpadu jenjang TK–SD dengan pendekatan *healing environment* di Boyolali menjadi sebuah kebutuhan mendesak, sekaligus langkah strategis dalam mewujudkan lingkungan belajar yang aksesibel, aman, nyaman, dan mampu mendukung perkembangan seluruh peserta didik secara holistik dan berkelanjutan.

### **1.3 Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana merancang sekolah inklusif terpadu jenjang TK–SD yang mampu mengakomodasi kebutuhan peserta didik dengan berbagai karakteristik perkembangan, termasuk anak berkebutuhan khusus di Boyolali. ?
- b. Bagaimana menerapkan pendekatan *healing environment* dalam perancangan sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, sehat, dan mendukung kesejahteraan psikologis peserta didik.?
- c. Bagaimana merancang lingkungan pendidikan yang mampu mendukung pembelajaran holistik, sehingga perkembangan peserta didik dapat berlangsung secara menyeluruh meliputi aspek kognitif, emosional, sosial, dan fisik.?

### **1.4 Tujuan dan Sasaran**

#### **1.4.1 Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari perancangan ini adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan konsep perancangan sekolah inklusif terpadu jenjang TK–SD yang mampu mengakomodasi keberagaman kebutuhan peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus.
- b. Menghasilkan penerapan pendekatan *healing environment* dalam desain arsitektur sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, sehat, dan mendukung kesejahteraan psikologis peserta didik.

- c. Menghasilkan konsep lingkungan pendidikan yang mampu mendukung pembelajaran holistik, sehingga proses belajar dapat menunjang perkembangan peserta didik secara menyeluruh.

#### **1.4.2 Sasaran**

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang ingin dicapai dalam perancangan ini meliputi:

- a. Mengidentifikasi karakteristik pengguna, kebutuhan ruang, serta pola aktivitas pada sekolah inklusif terpadu jenjang TK–SD sebagai dasar dalam penyusunan konsep perancangan.
- b. Mengkaji prinsip-prinsip *healing environment* yang dapat diterapkan dalam desain lingkungan sekolah, seperti pencahayaan alami, ventilasi, integrasi elemen alam, dan pengendalian kenyamanan sensorik.
- c. Mengembangkan konsep desain ruang dan kawasan sekolah yang mendukung pembelajaran holistik melalui penyediaan ruang belajar yang fleksibel, ruang interaksi sosial, serta ruang terbuka edukatif.

#### **1.5 Manfaat Kajian**

Kajian perancangan Sekolah Inklusif Terpadu Jenjang TK–SD di Kabupaten Boyolali dengan pendekatan *healing environment* memberikan kontribusi yang mencakup tiga dimensi manfaat secara sekaligus.

1. Secara akademik, kajian ini memperkaya khazanah keilmuan arsitektur pendidikan melalui integrasi konsep pendidikan inklusif dengan pendekatan desain berbasis kesejahteraan psikologis. Hasil kajian dapat menjadi referensi konseptual dan metodologis bagi penelitian maupun perancangan serupa, khususnya dalam penerapan prinsip aksesibilitas universal dan *healing environment* pada fasilitas pendidikan anak usia dini hingga sekolah dasar.
2. Secara praktis, kajian ini menghasilkan pedoman perancangan fasilitas sekolah inklusif yang komprehensif dan terpadu. Rekomendasi desain yang dihasilkan dapat menjadi acuan bagi arsitek, perencana kota, pemerintah daerah, maupun institusi pendidikan dalam mewujudkan lingkungan belajar

yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh.

3. Secara strategis, kajian ini berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah melalui penyediaan infrastruktur pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Model sekolah terpadu yang dihasilkan diharapkan dapat mendukung pemerataan akses pendidikan serta memperkuat komitmen pembangunan pendidikan inklusif, baik di tingkat lokal maupun regional.

#### 1.6 Lingkup dan Batasan Kajian

Lingkup kajian ini mencakup perencanaan dan perancangan Sekolah Inklusif Terpadu jenjang TK–SD di Kabupaten Boyolali dengan pendekatan *healing environment*. Kajian difokuskan pada aspek arsitektural yang meliputi analisis kebutuhan ruang pendidikan inklusif, perumusan konsep tata ruang terpadu antar jenjang, penerapan prinsip aksesibilitas universal, serta integrasi elemen desain yang mendukung kenyamanan fisik dan psikologis peserta didik. Selain itu, lingkup pembahasan mencakup analisis tapak, konteks lingkungan, zonasi kawasan, sistem sirkulasi, serta strategi desain yang mendukung lingkungan pembelajaran holistik.

Batasan kajian ini tidak membahas secara mendalam aspek manajerial operasional sekolah, kurikulum pendidikan, maupun kebijakan teknis pendidikan di luar konteks implikasinya terhadap kebutuhan ruang. Perhitungan struktur, detail konstruksi teknis, serta perencanaan anggaran biaya juga tidak dibahas secara rinci, melainkan hanya pada tingkat konseptual. Fokus utama kajian diarahkan pada perumusan konsep desain arsitektural yang responsif terhadap kebutuhan anak berkebutuhan khusus dan anak reguler dalam satu sistem pendidikan terpadu.

#### 1.7 Metodologi dan Pendekatan Perancangan

Metodologi yang digunakan dalam kajian ini bersifat kualitatif-deskriptif dengan pendekatan perancangan arsitektural berbasis isu. Tahapan perancangan diawali dengan identifikasi masalah melalui studi

literatur terkait pendidikan inklusif dan *healing environment*, analisis kebijakan nasional dan daerah, serta kajian preseden proyek sejenis. Selanjutnya dilakukan analisis kebutuhan ruang berdasarkan karakteristik pengguna (anak usia TK dan SD, termasuk anak berkebutuhan khusus), analisis tapak, serta analisis hubungan ruang dan aktivitas.

Pendekatan perancangan yang digunakan adalah *healing environment* yang diterjemahkan ke dalam prinsip desain seperti integrasi elemen alam, pencahayaan alami optimal, ventilasi silang, pengendalian akustik, dan zonasi ramah sensorik. Pendekatan ini dipadukan dengan prinsip *universal design* untuk memastikan aksesibilitas dan inklusivitas ruang. Proses perancangan dilakukan secara sistematis mulai dari perumusan konsep dasar, pengembangan konsep tapak dan massa bangunan, hingga penyusunan konsep ruang dan tampilan arsitektural yang mendukung pembelajaran holistik.

## **1.8 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan laporan perancangan ini disusun secara terstruktur untuk memudahkan pemahaman alur kajian, sebagai berikut:

### **1. Bab I Pendahuluan**

Memuat latar belakang pentingnya pengembangan Sekolah Inklusif Terpadu jenjang TK–SD di Kabupaten Boyolali sebagai upaya meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh peserta didik termasuk ABK, rumusan masalah, tujuan dan sasaran perancangan, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

### **2. Bab II Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori**

Menguraikan kajian teori yang menjadi dasar perancangan, meliputi konsep pendidikan inklusif terpadu TK–SD, karakteristik dan kebutuhan ruang ABK, pendekatan *healing environment* dalam arsitektur pendidikan, pembelajaran holistik, serta sintesis prinsip-prinsip perancangan sekolah inklusif.

### **3. Bab III Tinjauan Kontekstual dan Studi Preseden**

Bab ini membahas kondisi kontekstual yang berkaitan dengan perancangan sekolah inklusif, meliputi tinjauan perkembangan pendidikan inklusif secara global, nasional, dan lokal, khususnya di Kabupaten Boyolali. Selain itu, bab ini juga mengkaji kebijakan pemerintah terkait pendidikan inklusif serta menganalisis studi preseden atau studi banding terhadap proyek sekolah inklusif yang telah ada. Kajian tersebut bertujuan untuk memperoleh referensi desain serta memahami strategi perancangan yang dapat diterapkan dalam proyek yang dirancang.

#### **4. Bab IV Analisis dan Konsep Perancangan**

Bab ini memaparkan proses analisis yang menjadi dasar dalam penyusunan konsep perancangan sekolah inklusif terpadu jenjang TK–SD. Analisis yang dilakukan meliputi analisis kebutuhan ruang, analisis karakteristik pengguna, analisis tapak, serta analisis hubungan ruang dalam kawasan sekolah. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk merumuskan konsep perancangan yang mencakup konsep zonasi kawasan, konsep tata massa bangunan, konsep sirkulasi, serta penerapan pendekatan healing environment dalam desain arsitektur untuk mendukung terciptanya lingkungan pembelajaran yang holistik.

Sistematika ini disusun agar proses perancangan tersaji secara logis, analitis, dan akademis, sehingga mampu memperlihatkan keterkaitan antara isu, teori, analisis, hingga solusi desain yang diusulkan